



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBINAAN ANAK JALANAN, GELANDANGAN, PENGEMIS DAN PENGAMEN DI KOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN

Endang Sri Hidayah*

Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Jl. Ir. Soekarno Km. 20, Sumedang, Indonesia

* Corresponding Author

E-mail : sriendang@ipdn.ac.id

Abstract

Makassar City is a city that has various complex problems, including the existence of homeless youth, homelessness, beggars and Busker or street musicians. City development has become an attraction for the outside community so that it has an impact on the flow of urbanization, the population is increasing and it is difficult to find work in the city. This study aims to describe how the implementation of the Makassar City Regulation Number 2 of 2008 concerning Development of homeless youth, homelessness, beggars and Busker or street musicians, as well as to find out what strategies the Makassar City Government has implemented in dealing with homeless youth, homelessness, beggars and Busker or street musicians. The analysis conducted by researchers is using the theory of implementation of Van Meter and Van Horn with qualitative descriptive research methods with an inductive approach. To analyze the strategy, the researcher used a SWOT analysis to provide an alternative strategy. From the research results, it is concluded that the coaching has not been successful, there are still measures and policy objectives that have not been achieved, additional funding resources are needed for employees who go to the field every day, the characteristics of the implementing agencies in implementing this policy are adjusted to the objects found in the field. , although communication between organizations between Dinsos in collaboration with the Satpol PP, YKP2N and rehabilitation centers has been carried out quite well, the economic, social and political environment of the community has not played an active role in helping the City Government implement this policy. There are still many people with social illnesses who have been coached back to the streets, the attitude of the implementers has the principle of integrity coordination and synchronization both vertically and horizontally, although in practice it has not been carried out optimally. Based on the identification results of internal factors and external factors in the SWOT analysis, 9 (nine) strategic issues were generated.

Keywords: implementation, policy, coaching, homelessness, city of Makassar.

Abstrak

Kota Makassar merupakan kota yang memiliki berbagai permasalahan yang kompleks, diantaranya keberadaan anjal, gepeng, dan pengamen diberbagai tempat umum. Pembangunan kota menjadi daya tarik masyarakat luar sehingga berdampak pada arus urbanisasi, jumlah penduduk semakin meningkat dan sulitnya mencari pekerjaan di kota. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen, serta mengetahui strategi apa saja yang dilakukan Pemkot Makassar dalam menangani anjal, gepeng, dan pengamen. Analisis yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Untuk menganalisis strategi peneliti menggunakan analisis SWOT untuk memberikan alternatif strategi yang dihasilkan. Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa pembinaan tersebut dikatakan belum berhasil, masih adanya ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai, diperlukan sumber daya dana tambahan bagi pegawai yang setiap hari turun ke lapangan, karakteristik instansi pelaksana dalam melaksanakan kebijakan ini disesuaikan dengan objek yang ditemui di lapangan, walaupun komunikasi antar organisasi antar Dinsos yang bekerja sama dengan satpol PP, YKP2N dan panti rehabilitasi sudah terlaksana cukup baik, namun lingkungan ekonomi, sosial dan politik masyarakat belum berperan aktif dalam membantu Pemkot menerapkan kebijakan ini. Masih banyak para penyandang penyakit sosial yang sudah dibina kembali lagi ke jalanan, sikap para pelaksana memiliki prinsip koordinasi intergritas dan sikronisasi baik secara vertikal maupun horizontal walaupun pada pelaksanaannya belum terlaksana secara maksimal. Berdasarkan hasil identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal pada analisis SWOT, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pembinaan, Anjal, Kota Makassar.

I. PENDAHULUAN

Kota Makassar merupakan Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah seluas 175,77 km² dan pada Tahun 2018 tercatat dalam data BPS jumlah penduduk Kota Makassar kurang lebih 1.467.601 jiwa menjadikan Kota Makassar sebagai salah satu kota yang memiliki permasalahan yang kompleks termasuk masalah sosial dengan munculnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di titik-titik tertentu di wilayah keramaian perkotaan dan keberadaan mereka mengganggu ketertiban umum.

Penanganan masalah masyarakat miskin yang bergantung pada penghasilan di jalanan merupakan masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak, terutama pemerintah setempat. Kemiskinan seringkali didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung hidup (Suyanto 2011:132). Dalam hal ini pula Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen (Anasiru 2011:3). Upaya ini berupa pembinaan pencegahan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi, pengawasan dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak jalanan, gelandangan, pengamen dan pengemis.

Dinas Sosial (Dinsos) merupakan salah satu instansi yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan terhadap pencegahan berkembangnya jumlah anak jalanan, pengemis, gelandangan dan pengamen (Engkus 2019:1). Dalam menangani para penyandang penyakit sosial tersebut. Dinsos telah berusaha melakukan upaya-upaya pengendalian sesuai dengan amanat peraturan daerah yang berlaku, mulai dari melaksanakan pendataan langsung ke lapangan yang bekerja sama dengan LSM setempat dan melibatkan Satpol PP serta melalui pembentukan Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang, yang dimana TIM TRC ini melakukan patrol dan razia setiap hari pada sejumlah titik yang menjadi wilayah berkumpulnya para penyandang penyakit social tersebut. (Asrul Nurdin 2011:74).

Tabel 1.

Data Hasil Patroli para Penyandang Penyakit Sosial yang Terjaring Razia

No	Thn	Anjal	Gepeng	Pengamen	Jml
1	2	3	4	5	6
1	2016	211	119	106	437
2	2017	372	285	70	727
3	2018	332	247	174	753

Sumber: Dinas Sosial Kota Makassar.

Untuk tahun 2016 jumlah anjal, gelandangan dan pengemis yang terjaring patrol menembus hingga 437 orang. Sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 jumlah anjal, gelandangan dan pengemis mengalami peningkatan, tercatat ada 727 orang di tahun 2017 dan tahun 2018 sejumlah 753 orang yang terjaring patroli. Permasalahan-permasalahan lain yaitu belum optimalnya ketersediaan panti rehabilitasi bagi para anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pengamen di Kota Makassar. Kota Makassar belum memiliki asrama khusus.

Kendala lainnya yaitu kurangnya sarana dan prasarana membuat pembinaan yang dilakukan Dinsos berjalan tidak maksimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa para penyandang penyakit sosial yang telah terjaring razia. Mereka hanya didata dan mendapat bimbingan mental selama beberapa hari sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. Setelah dikembalikan ke daerah asalnya tidak ada efek jera pada mereka. Dan hal tersebut membuat mereka kembali berdatangan ke Kota Makassar. Apabila hal ini terus menerus terjadi maka masalah ini sulit untuk diatasi secara tuntas. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian tentang Implementasi Kebijakan Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen, masih sangat relevan untuk dilakukan kajian dan analisa lebih mendalam. Penelitian-penelitian terdahulu menjadi bahan rujukan dan referensi bagi peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Tinjauan Penelitian Terdahulu : penelitian ini berdasarkan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam konteks pembinaan anjal, gepeng, dan pengamen. Penelitian (Putro 2014) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya Pembinaan PGOT ada beberapa tahap yaitu, pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, perencanaan program pelayanan, pelaksanaan pelayanan dan pasca pelayanan. Untuk faktor penghambat yang paling mendasar adalah kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang kurang memadai, sementara faktor pendukung yaitu adanya kerjasama lintas sektoral yang menunjang proses pembinaan. Penelitian kedua, (Tribuwono 2017) Hasil Penelitian yakni kebijakan belum berjalan secara, karena tujuan kebijakan ini belum bisa tercapai, karena hasil data tiga tahun terakhir menunjukkan jumlah para penyandang penyakit social yang terus meningkat. kemudian dari sisi sumberdaya manusia dan finansialnya Dinsos mengalami kendala kekurangan, sehingga kegiatan

pembinaan tidak berjalan maksimal. Komunikasi dan koordinasi Dinsos dengan pihak lain masih kurang, padahal masih sangat banyak LSM yang sebetulnya bisa diajak berkoordinasi agar pembinaan dapat berjalan dengan baik. Penelitian (Susilowati 2017), hasil penelitian menunjukkan mayoritas anak jalanan berada pada usia 10-15 tahun yaitu sebanyak 54,17%, 33,33% berusia lebih dari 15 tahun dan sebanyak 12,5% berusia kurang dari 10 tahun. Peran orang tua sangatlah penting dalam penanggulangan anak jalanan. Faktor kemiskinan yang menjadi faktor utama munculnya anak jalanan maka pemerintah, LSM dan masyarakat harus bersinergi untuk memberdayakan keluarga anak jalanan, dengan meningkatnya ekonomi keluarga maka anak dapat fokus untuk menempuh pendidikan. Penelitian (Nusanto 2017), hasil penelitian menunjukkan upaya dalam menangani masalah gelandangan dan pengemis ini Dinas Sosial Kabupaten Jember telah melaksanakan berbagai program Penyuluhan sosial di tempat gelandangan dan pengemis berada, Penguatan keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan dan pendidikan, lapangan kerja dan pendapatan keluarga, Mendirikan pos pelayanan gelandangan dan pengemis untuk memberikan konsultasi, pendataan, penjangkaran, rujukan bagi gelandangan dan pengemis untuk ditindak lanjuti proses rehabilitasi, Melakukan Razia di tempat-tempat dimana gelandangan dan pengemis itu sering berada. Razia ini dilakukan setelah penyuluhan sosial dimulai untuk menjaring gelandangan dan pengemis yang selanjutnya ditampung sementara dalam barak penampungan sebelum dikirim ke panti rehabilitasi sosial, Mengoptimalkan fungsi UPTD Liposos dan LSM yang menangani gelandangan dan pengemis, Kerja sama dengan dunia usaha dalam rangka penempatan tenaga kerja gelandangan dan pengemis. Penelitian (Engkus 2019), hasil penelitian menunjukkan, bahwa Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengenai pembinaan anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, dapat dikatakan belum mampu efektif dalam penerapannya, hal tersebut dilihat tujuan dan sasaran dari peraturan tersebut, dimana belum ada yang dapat tercapai secara maksimal. Kemudian, sumber daya dari Dinsosnangkis sendiri masih terbilang kurang. Dan masyarakat juga masih kurang berperan aktif dalam mendukung penerapan kebijakan ini, terbukti masih banyak orang yang justru memberikan uang kepada anak jalanan dengan alasan kasihan maupun agar mereka cepat pergi dan tidak mengganggu. Padahal sudah jelas ada larangan dan himbauan dari pemerintah kepada masyarakat agar tidak memberikan uang terhadap anak jalanan atau gelandangan di jalanan.

Pernyataan Kebaharuan Ilmiah. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian berbeda, yaitu focus pada implementasi kebijakan pembinaan anjal, gepeng, dan pengamen di Kota Makassar, dengan menggunakan teori implementasi kebijakan (Van Meter and Van Horn 1975). Dari Teori

Implementasi Kebijakan Van Meter Van Horn tersebut terdapat 6 (enam) variabel dan akan dijadikan dasar landasan teori pada penelitian ini: (1) Standar atau ukuran dan tujuan kebijakan yang menguraikan tujuan dari Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan pengamen, (2) menjelaskan Sumber Daya yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 tahun 2008 yaitu Dinas Sosial yang bertanggung jawab dan memiliki wewenang dalam pelaksanaan perda tersebut. Hal tersebut merupakan hal penting yang akan menjadi tolak ukur terlaksananya suatu kebijakan dan juga merupakan unsur penunjang di dalam proses Implementasi Kebijakan, (3) Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana, mulai dari tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas dari organisasi pelaksana, badan hubungan formal dan informal dengan pembuat kebijakan, (4) Komunikasi antarorganisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, hubungan antara pemerintah Daerah dan Petugas seperti Satpol PP,dll yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan dengan Anjal, Gepeng, dan pengamen harus memiliki Komunikasi yang baik, sehingga kebijakan dapat di implementasikan dengan baik, (5) Lingkungan Ekonomi, sosial, dan politik, hal ini akan di sesuaikan dengan lokus penelitian nanti, (6) Sikap dari para pelaksana, dalam hal ini menjelaskan tentang setuju dan tidak setuju mengenai proses Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yang mencakup tiga unsur didalamnya, yaitu: kognisi mereka (pemahaman,pengertian) atas Peraturan Daerah Kota Makassar No 2 tahun, arah respon mereka terhadap peraturan tersebut (Penerimaan, netralisir, penolakan) serta menjelaskan tentang intensitas dari respon tersebut.

Upaya yang dilakukan dalam kebijakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen akan menghasilkan *output* dari pelaksanaan peraturan daerah tersebut atau disebut dengan implementasi dari kebijakan peraturan daerah tersebut. Seperti yang diketahui, bahwa salah satu tahapan yang sangat penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan. Tahap ini sering dianggap kurang berpengaruh karena hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan (*policy makers*) (Nugroho 2017:664)

Pada kenyataannya tahapan implementasi ini menjadi begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain implementasi merupakan tahapan dimana kebijakan yang telah diambil dilaksanakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Dengan fenomena semakin banyaknya masyarakat miskin yang menafkahi dirinya di jalanan yang kemudian diterlantarkan membuat konsep ini tidak akan berjalan ideal (Putro 2014; Susilowati 2017). Jelas masalah ini bukanlah sebuah masalah

yang harus dikesampingkan. Peraturan yang telah dibuat untuk mengatur permasalahan fenomena kemiskinan perlu dikaji ulang.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif (Engkus 2019:4). Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang

menjadi fokus penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan. Salah satu implementasi kebijakan dengan pendekatan *top-down* (Van Meter and Van Horn 1975:1450) disebut sebagai “*A Model of The Policy Implementation Process*” menawarkan suatu model dasar yang dimana model tersebut menawarkan enam variabel yang membentuk kaitan (*linkage*) kebijakan dan kinerja (*performance*), sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan kebijakan, dimana kinerja implementasi pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat tercapainya standar dan sasaran tertentu yang telah ada.

Tabel 2.
Operasional Konsep Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Sub Dimensi
1	Implementasi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar /Ukuran dan Tujuan 2. Sumber Daya 3. Ciri-ciri atau karakteristik badan/instansi pelaksana 4. Komunikasi antar organisasi 5. Lingkungan ekonomi, sosial, dan Politik 6. Sikap para Pelaksana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran dan tujuan jelas 2. sejauh mana ukuran dan tujuan dilaksanakan 1. Sumber daya manusia 2. Sumber Dana 1. Struktur birokrasi 2. Norma-norma 1. Pengkomunikasian ukuran-ukuran dan sasaran 2. Konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan sasaran 1. Sumber daya ekonomi 2. lingkungan yang mendukung 3. Dukungan kelompok-kelompok kepentingan Karakteristik partisipasi (mendukung netral atau menolak) 1. Pemahaman mereka tentang pelaksanaan program 2. Tanggapan (menerima, netral, menolak) 3. Intensitas (menerima, netral, menolak)

(Van Meter and Van Horn 1975)

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, observasi, wawancara, dokumentasi (Cindy Ayu Prasasi, Lita Tyesta ALW 2016) sedangkan teknik analisis menggunakan SWOT (Fatima 2016:16) untuk mengatasi kendala Implementasi Kebijakan tersebut. Analisis SWOT merupakan suatu instrument pengidentifikasi sebagai faktor yang terbentuk secara sistematis yang digunakan untuk merumuskan strategi organisasi.

Pendekatan analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*) sekaligus dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Secara singkat analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah hal-hal yang mempengaruhi keempat faktornya.

Dengan demikian, hasil analisis dapat membentuk perencanaan strategi berdasarkan hasil analisa

terhadap faktor-faktor strategis organisasi (Fatima 2016:7).

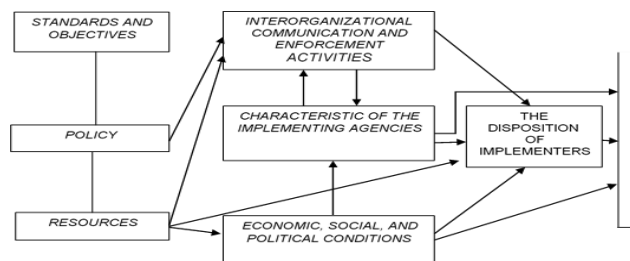
Tabel 3.
Matriks SWOT

Faktor internal	STRENGTH (S) Daftar Kekuatan Internal	WEAKNESSES (W) Daftar kelemahan internal	
	OPPORTUNITIES (O) Daftar peluang eksternal	Strategi SO Menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Meminimalkan untuk memanfaatkan peluang
Faktor eksternal	THREATS (T) Daftar ancaman eksternal	Strategi ST Menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Meminimalkan dan menghindari ancaman

Sumber: (Fatima 2016:89)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengkaji implementasi kebijakan tersebut penelitian ini akan berfokus pada model implementasi kebijakan menurut (Van Meter and Van Horn 1975) sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Model Proses Implementasi Kebijakan Van Meter, Van Horn

Sumber: (Van Meter and Van Horn 1975:1450)

Ukuran dan Tujuan kebijakan

Pembinaan yang di maksud dalam perda no 2 tahun 2008 menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan yang dilakukan baik secara terorganisir maupun terencana untuk mencegah munculnya para penyandang penyakit social yang dimaksud, pengendalian ini dilakukukan agar meningkatnya taraf hidup para penyandang penyakit social tersebut. Pembinaan disini pun melaksanakan kegiatan sesuai tahap rencana kemudian di organisir untuk tujuan mengurangi mencegah, dan mengurangi

jumlah keberadaan para penyandangan penyakit social agar terciptanya ketertiban umum.

Pembinaan anjal, gepeng dan pengemis memiliki tujuan diantaranya:

- Terciptanya ketentraman dan ketertiban masyarakat serta memberi perlindungan.
- Menjunjung tinggi HAM, martabat dan harkat sebagai WNI
- Menjaga norma sifat kekeluargaan agar terwujudnya kehidupan yang tertib.
- Terciptanya perlakuan yang proposional dan adil kepada masyarakat.
- Meningkatnya masyarakat yang tertib lewat kepastian hukum agar masyarakat terlindung, dapat hidup damai dan tenang.
- Terwujudnya kepentingan masyarakat, dengan kepentingan Negara. Serta terwujud pula keserasian, keseimbangan dan keselarasan individu terhadap masyarakat.

Kemudian, pada Peraturan Daerah no. 2 tahun 2008 pasal 6 disebutkan, ada tindak lanjut dari jenis pembinaan pencegahan, yakni: pembinaan lanjutan, usaha rehsos, eksploitasi, pemberdayaan, bimbingan lanjut, dan partisipasi masyarakat. Pada wawancara dengan Kepala Dinsos Kota Makassar, Bapak Akhmad Namsum S. Ag, M.M pada hari Senin 17 Juli 2019 di ruang kerja Kepala Dinas Sosial menyatakan bahwa:

“peraturan daerah kota makassar ini dibuat dengan tujuan salah satunya adalah memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketekarefrentraman masyarakat. Sebenarnya peraturan ini sudah kami upayakan agar terimplementasi dengan baik. Tetapi sepertinya masih banyak kendala dilapangan terkait keberadaan para anjal, gepeng dan pengamen. Tetapi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, para pelaksana saya rasa sudah menunjukkan kerja terbaiknya dan juga sudah berupaya untuk mencapai target dan sasaran kerja, seperti pihak kami selaku Dinsos dan juga dibantu oleh pihak Satpol PP dalam menjalankan patroli dan razia. Kami setiap hari turun dijalanan dan terus berupaya dengan baik melaksanakan tugas penertiban namun masih banyak kendala kaitannya dengan peraturan daerah ini, ya sosialisasi mungkin yang kurang kepada masyarakat, karena masyarakat sendiri yang memberi uang kepada anjal, gepeng dan pengamen sehingga mereka terus berada dijalanan. Dan kendala lain yaitu belum adanya panti rehabilitasi untuk menampung mereka yang terjaring razia, jadi kami masih bekerja sama dengan pihak swasta”.

Dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, para implementator khususnya Instansi Dinsos Kota Makassar memiliki ukuran dan tujuan yang harus dicapai dalam setiap kegiatannya. Namun, pada saat peneliti melakukan observasi ke lapangan, memang pada saat jam patroli keberadaan para anjal, gepeng dan pengamen memang tidak terlihat. Patroli dilakukan oleh Pihak Dinsos dan dibantu oleh Pihak Satpol PP yang terbentuk dalam Tim TRC. Tim Reaksi Cepat (TRC) Saribattang secara intens melakukan patrol dan razia di sejumlah titik yang menjadi wilayah berkumpulnya anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen Pada pagi hari, Tim TRC berpatroli keliling Kota Makassar kemudian berhenti di Basecam TRC dan menunggu laporan selanjutnya dari masyarakat terkait keberadaan anjal, gepeng dan pengemis. Tetapi pada saat peneliti melaksanakan observasi tanpa tim TRC di malam hari pada pukul 23.00 WITA, terlihat sangat banyak keberadaan para anjal dan gepeng. Mereka berkeliaran ditempat yang masih ramai dikunjungi pada malam hari seperti kawasan Anjungan Pantai Losari.

Peneliti melakukan wawancara pada hari Selasa, tanggal 18 Juni pukul 23.20 WITA kepada salah satu

anak jalanan bernama Amal, anak tersebut mengatakan:

“kalau malam hari jarang ada patroli dan razia, pagiji sampai sore biasanya ada satpol pp keliling pakai mobil besar. Baru kalau malam lebih rameki ini tempat jadi bisaka jualan tisu sambil minta-minta uang. Cape iya dirasa kerja malam-malam tapi maumi diapa karna butuhka juga uang untuk ibu ku karena bapakku meninggalmi baru sayaji cari uang sama kakakku. Kalau kakakku biasanya pergi jual tisu di daerah masjid raya”.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bisa disimpulkan bahwa ukuran dan tujuan dari perda tersebut belum terlaksana dengan baik. Pihak Dinsos dan satpol PP memang sudah bekerja secara maksimal dalam melaksanakan pembinaan pencegahan yakni melaksanakan patroli dan razia. Hanya saja para anjal, gepeng dan pengemis sudah mahir membaca situasi sehingga mereka terus mencari celah agar terus mengais rejeki di pinggir jalan.

Sumber Daya

a) Sumber Daya Manusia

Salah satu faktor utama dalam optimalisasi suatu kebijakan adalah unsur pelaksana. sumber daya manusia atau pelaksana tersebut meliputi staf dengan jumlah yang tepat dan memiliki keahlian yang diperlukan. Untuk pegawai Dinsos Kota Makassar berjumlah 103 orang dan dibagi-bagi menurut tugas dan fungsinya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, Bapak Drs. Muh. Hatta selaku kepala Seksi Pembinaan Anjal dan Gepeng mengatakan jika dilihat dari segi kualitas dan kuantitas Dinsos Kota Makassar sudah memiliki SMD yang cukup untuk melaksanakan pembinaan kepada para penyandang penyakit social tersebut.

"bagi saya, jika di lihat dari segi kuantitasnya, pembentukkan Tim ini sendiri jumlahnya 33 (tiga puluh tiga) orang, yaitu Ketua, Sekretaris dan pihak satpol PP. dan sisanya dari Dinsos. Setiap harinya kami gilir dalam pelaksanaan patroli dijalanan. Jumlah keseluruhan bagi saya sudah cukup. Anggota Tim TRC pun sudah memiliki latar belakang pendidikan yang baik juga menurut saya memiliki pengalaman yang sangat cukup”.

Tabel 4.

Daftar Jumlah Pegawai Dinsos Kota Makassar

Jenis Kelamin	Golongan						Tenaga kontrak			Total
	II.c	III.a	III.b	III.c	III.d	IV.a	IV.b	IV.c		
Perempuan	2	3	0	1	9	6	1	0	32	54
Laki-laki	1	1	2	2	5	4	2	1	31	49
JUMLAH	3	4	2	3	14	10	3	1	63	103

Sumber: Dinsos Kota Makassar 2019

Jika melihat tabel di atas, terbagi beberapa golongan dari gol. II.c sampai gol. IV.c. Golongan terbanyak bekerja di Dinsos Kota Makassar yaitu Gol. III.d dengan jumlah 14 orang. Namun jika melihat tabel di atas, pegawai yang memiliki golongan jumlahnya lebih sedikit dengan jumlah tenaga kontrak. Dimana jumlah pegawai tenaga kontrak sebanyak 63 orang. Jika dilihat, seluruh pegawai Dinsos Kota Makassar yang berjenis kelamin laki-laki memiliki jumlah yang lebih sedikit yaitu 49 dibandingkan dengan jumlah pegawai perempuan yang berjumlah 54 orang.

Jumlah pelaksana sudah sesuai dengan beban kerja yang dihadapi. Dimana secara khusus adanya sebuah tim yang dibentuk yaitu Tim TRC dalam rangka pembinaan para penyandang penyakit social tersebut. Ditambah anggota Satpol pp yang berjumlah 6 orang. Para anggota ini sebelumnya sudah diberikan pembekalan sehingga dalam menjalankan tugas pembinaan tidak terdapat kesulitan dalam hal sumber daya manusianya.

Tetapi, pada saat observasi penulis pun ikut berpatroli dengan Tim TRC Saribattang, dan beberapa anggota satpol pp dan beberapa petugas Dinsos belum maksimal menjalankan tugas. Umur yang sudah tidak muda lagi dan kegiatan patroli tersebut identik dengan kegiatan lapangan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya kegiatan penertiban dan razia pada saat kegiatan patrol. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa orang dari pihak satpol pp dan Dinsos yang tidak mampu lagi mengejar para penyandang penyakit sosial pada kegiatan patroli.

b) Sumber Daya Dana

Sumber daya dana merupakan hal yang penting pula. Saat SDM dikatakan sudah kompeten secara kualitas dan kuantitas, tetapi ketersediaan dana tidak tersedia secara maksimal, maka hal tersebut bisa menjadi masalah baru untuk menjalankan implementasi kebijakan pembinaan anjal, gepeng dan pengamen. Pada wawancara hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, Kabid Rehabilitasi Sosial Bapak Ir. Zainal, ST, M, Si mengatakan:

"memang Dinsos Kota Makassar anggaran setiap tahunnya dari APBD. APBD tersebut untuk pelaksanaan kegiatan patroli, selama pembinaan, maupun untuk memelungkan

kembali anjal, gepeng dan pengamen ke asal mereka tinggal. Dan sampai saat ini, saya rasa dana dari APBD itu sendiri cukup untuk kami Dinsos cukup untuk melaksanakan tupoksi kami"

Dari hasil wawancara yang telah lakukan, Bapak Zainal mengungkapkan bahwa secara anggaran, Dinsos Kota Makassar tidak mengalami kesulitan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. Namun hal berbeda peneliti dapatkan dari hasil wawancara anggota satpol PP yang bernama Bapak Munawir yang pada saat itu melaksanakan kegiatan patroli pada hari Rabu tanggal 19 Juni, menyatakan:

"Kalo untuk kami anggota yang patroli yang turun ke lapangan, kita diberikan dana operasional. Dimana kita dapat dalam kurun waktu tiap bulan dan sudah termasuk uang bensin, makan dan juga minum. itu di luar gaji pokok dan dana operasional lainnya. Bukannya dibilang tidak mau bersyukur, tapi kan kegiatan lapangan seperti ini membuat lelah. Belum lagi rumah saya jauh. Harapannya sih diberikan dana operasional yang lebih layak lah dengan kegiatan ini, agar kami lebih semangat bekerja"

Menurut Munawir selaku satpol pp, adanya dana operasional diharapkan bisa meningkat, mengingat kegiatan patroli merupakan kegiatan yang melelahkan dan bisa memotivasi semangat dalam bekerja. Besarnya dana operasional yang diberikan kepada para pelaksana kegiatan, itu semua tergantung dari seberapa banyaknya jumlah anggota TRC Saribattang yang turun ke lapangan. Dikarenakan ada absen pada saat kegiatan patrol, maka kehadiran mereka dapat diketahui. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara lain yang peneliti dapatkan dari Kepala Subag Keuangan bernama Bapak Armin, S.Ag, M.Pd pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019, menyatakan sebagai berikut:

"Untuk alokasi anggaran dalam kegiatan patroli dan pelatihan saya katakan masih kurang dari jumlah APBD yang ada, terutama untuk tim patroli yang bekerjanya setiap hari. Tapi jumlah Pendapatan Anggaran Daerah Kota Makassar tidak

hanya digunakan pada Kegiatan Dinsos. Jadi kami menggunakan dana yang ada dengan semaksimal mungkin.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bapak Amrin mengatakan Dinsos Kota Makassar masih

berharap adanya penambahan dana terutama pada kegiatan patroli dan pelatihan keterampilan para penyandang penyakit social tersebut, dikarenakan beban kerja yang setiap hari dilakukan.

Tabel 5.

Jumlah Pendanaan Seksi Pembinaan Anjal, Gepeng dan Pengamen Tahun 2019

Perihal	Rupiah
Paket dan Bahan Praktek Pelatihan keterampilan kerja untuk anjal, gepeng, dan pengamen	444.257.000
Patroli (Honor dalam kurun waktu 1 tahun)	1.319.338.500
Jumlah	1.763.595.500

Sumber: Dinsos Kota Makassar 2019

Berdasarkan tabel di atas, diketahui jika dana yang diperoleh Dinsos Kota Makassar dalam merealisasikan kebijakan pembinaan anjal, gepeng dan pengamen sebetulnya cukup banyak. Namun, dari hasil ketiga pernyataan penulis dapat dari hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa pihak Dinsos Kota Makassar menganggap jika dana APBD yang telah diperoleh untuk melaksanakan kebijakan dari perda tersebut masih tergolong kurang, dikarenakan pelaksanaan kegiatan razia yang berjalan setiap hari. Kemudian, jumlah para penyandang penyakit social tersebut yang jumlah angkanya tidak mudah untuk dikurangi, hal tersebut membuat Dinsos Kota Makassar lebih bekerja ekstra tetapi hal tersebut juga harus didukung dari segi finansialnya.

Karakteristik Instansi Pelaksana

Kegiatan pembinaan anjal, gepeng dan pengamen dilakukan oleh Dinsos Kota Makassar. Dimana dalam pelaksanaan pembinaan pencegahannya dibantu oleh Satpol PP kota Makassar. Dalam menjalankan tugasnya Dinsos dan anggota Satpol PP selalu berpatroli di seputaran Kota Makassar untuk memantau keberadaan para anjal, gepeng dan pengamen. Seperti pada saat akan datangnya bulan suci ramadhan, Dinsos dan satpol pp Kota Makassar lebih intens turun kelapangan. Kegiatan yang rutin dilakukan oleh Dinsos Kota Makassar melalui patroli yang dilakukan bersama dengan TIM TRC Saribattang. Tim TRC, melakukan patroli sebanyak 2 shift/hari, dimana awal pada pukul 11.00 s.d 15.00 WITA, dan rute patrolinya adalah wilayah pettarani, boulevard, pengayoman, alauddin. Sedangkan pada shift kedua patroli dilakukan pada pukul 15.00 s.d 20.00 WITA dengan rute rip, perintis, daya, dan sudiang. Jika dalam pelaksanaan patroli ditemukan para penyandang penyakit social, maka mereka akan ditangkap langsung oleh petugas. Hal ini sesuai dengan hasil observasi peneliti di lapangan, kemudian didukung oleh tanggapan Kepala Seksi Pembinaan

Anjal dan Gepeng, Bapak Drs Muh. Hatta pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 yang mengatakan: “kalau anjal sendiri, pasti langsung kami tangkap karena biasanya mereka itu yang langsung kabur pada saat melihat kami patrol, dan paling susah menerima arahan dari kami.”

Ketika TIM TRC dan Dinsos Kota Makassar melakukan kegiatan patroli, tidak sedikit ditemukan para penyandang penyakit social tersebut yang terjaring razia melawan petugas. Pada kasus yang seperti ini, petugas awalnya akan melakukan pendekatan secara persuasive, namun ketika cara tersebut tidak diterima baik oleh penyandang penyakit social yang tertangkap, maka petugas mengambil langkah dengan tindakan bersifat represif. Yakni melakukan pengejaran. Setelah tertangkap maka secara paksa akan langsung di masukkan ke dalam mobil patroli. Apabila mereka masih juga melawan, maka tindakan yang lebih tegas lagi akan di lakukan oleh petugas, contohnya seperti gertakan maupun sentuhan fisik. S Dillo, penjual tissue yang terjaring razia saat patroli hari Rabu tanggal 19 Juni 2019 di Anjungan Pantai Losari, Dillo mengatakan: “Tadi pada saat saya sedang mengamen, langsung ada petugas turun dari mobil, saya kaget dan pada saat saya mau lari, saya langsung ditangkap sama petugas. Saya melawan, tapi langsung ditarik paksa.”

Berdasarkan pernyataan Dillo ketika bertemu petugas patrol yang turun dari mobil, dengan cepat ia berlari tetapi pada akhirnya terkejar juga oleh petugas, karena melawan, ia mendapat cengkraman di bagian lehernya oleh petugas. Saat saya observasi di lapangan, tim TRC dan Dinsos Kota Makassar akan bertindak dengan tegas pada para penyandang penyakit social yang mencoba melakukan tindakan perlawanan kepada petugas.

Kesimpulannya yakni, karakteristik dari Dinsos Kota Makassar dalam melaksanakan kebijakan tersebut, disesuaikan dengan objek yang ditemukan di lapangan pada saat patroli. Bila dengan cara persuasif para penyandang penyakit social ini dapat diamankan

dengan baik, maka petugas tidak akan bertindak dengan keras. Tetapi, apabila objek di lapangan berusaha melawan atau melarikan diri, maka petugas akan bertindak dengan tegas dan keras dalam menertibkan para penyandang penyakit social tersebut.

Komunikasi Antar Organisasi

Pelaksana utama dalam penerapan kebijakan ini adalah Dinsos Kota Makassar. Tentu Dinsos tidak mampu melaksanakannya sendirian. Oleh karenanya, Dinsos bekerja sama dengan beberapa elemen seperti, panti rehabilitasi, YKP2N, dan satpol pp. Terkait bentuk komunikasi antar elemen tersebut, peneliti melakukan wawancara kepada Kepala Bidang Rehsos pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, menyatakan:

" dengan satpol pp sendiri, kami selalu melakukan koordinasi dengan baik. Kami juga dibantu oleh pihak satpol pp, jumlahnya 6 orang, mereka membantu dalam memperlancar kegiatan patroli. Sebagai pimpinan, saya berusaha terbuka. Saya yang sebagai pimpinan berusaha untuk terbuka bila dari lain (satpol pp) memiliki keluhan ataupun saran terkait kegiatan di lapangan dsb."

Komunikasi dan koordinasi yang telah dilakukan pihak Dinsos dengan satpol pp sudah berjalan cukup baik, mereka membantu Dinsos dalam kegiatan pembinaan. koordinasi yang dilakukan dengan pihak YKP2N selaku panti rehabilitasi untuk pemakai dan pecandu narkoba, dikatakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pembinaan Anjal dan Gepeng sebagai berikut pada hari Rabu tanggal 19 Juni:

"Dengan YKP2N yang ingin membantu dan bekerjasama dengan pihak Dinsos dalam mengurangi jumlah anjal dan gepeng, tentu kami (Dinsos) bersyukur dengan hal ini. Gepeng serta anjal yang sudah melakukan tes urin, apabila dinyatakan positif memakai narkoba, maka akan langsung alihkan ke YKP2N karena disana mereka akan ditindak lanjut dan mendapat rehabilitasi secara khusus dan itu adalah tupoksi dari YKP2N sendiri."

Komunikasi dan Koordinasi yang dilakukan oleh pihak YKP2N terhadap Dinsos Kota Makassar sudah terlaksana cukup baik. Mereka telah bersedia membantu Pihak Dinsos untuk melakukan rehabilitasi para penyandang penyakit social yang positif menggunakan narkoba. Kemudian peneliti mewawancarai Kepala Dinsos pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, beliau mengatakan:

"Dinsos sampai dengan saat ini melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik pada saat melakukan penanganan terhadap anjal dan gepeng, salah satunya rutin

bekerja sama dengan YKP2N. apabila pada saat kegiatan patroli yang dilakukan oleh Dinsos ditemukan diantara mereka yang terjerang positif menggunakan narkoba, maka akan langsung ambil alih oleh pihak YKP2N untuk segera dilakukan tindak lanjut."

Hasil observasi terkait aktivitas pelaksana kegiatan pembinaan, Dinsos sendiri memiliki alur pembinaan yang rutin. Dimana patrol dilakukan setiap hari mulai pukul 10.00 s.d 15.00 WITA dan pukul 16.00 s.d 20.00 WITA. Anjal, dan gepeng telah terjerang razia akan segera dibawa ke rumah Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Kota Makassar untuk dilakukan pendataan awal. Jika terlihat atau terdeteksi sebagai pemakai narkoba, maka Dinsos langsung membawa yang bersangkutan ke YKP2N untuk ditindak lanjuti secara khusus. Pemakai narkoba yang sering ditemuklan yaitu anjal. Pengamen yang tertangkap biasanya akan dihancurkan alat music miliknya. Penyandang penyakit social yang tinggal di Kota Makassar, mereka akan dipulangkan ke tempat asal. Untuk gepeng sendiri, jika masih tergolong anak-anak, orang tua atau wali mereka akan dihubungi dan diberi pengarahan oleh Dinsos. Bagi gepeng yang masuk golongan usia kerja atau dikatakan dewasa, apabila tinggal di luar Kota Makassar, mereka dikembalikan di kampung asal mereka. Namun, yang berdomisili di Kota Makassar dan tidak mempunyai pekerjaan, pihak Dinsos akan memberi pelatihan berupa keterampilan dengan harapan memiliki pekerjaan dan arah hidup yang lebih baik.

Maka bisa disimpulkan, jika komunikasi dan koordinasi antara Dinsos dengan elemen lain yang terlibat sudah cukup bagus sehingga pembinaan para penyandang penyakit social ini dapat berjalan dengan baik.

Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik

Lingkungan eksternal yang dalam penerapan suatu kebijakan merupakan hal yang tidak kalah penting dan perlu di perhatikan. Karena Lingkungan eksternal dapat membawa pengaruh dalam suatu implemtasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi factor penyebab kegagalan implemtasi kebijakan. Lingkungan eksternal yang kondusif perhatikan agar implementasi kebijakan dapat terlaksanakan dengan baik. Masyarakat setempat, merupakan lingkungan eksternal yang paling dekat dalam implementasi kebijakan pembinaan anjal dan gepeng. Untuk itu peneliti mewawancarai salah seorang masyarakat yang juga pengguna jalan raya pada hari Kamis tanggal 20 Juni bernama Bapak Kamaruddin, beliau mengatakan:

"Saya sepakat dengan kebijakan ini, karena keberadaan mereka yang ada di persimpangan lampu merah mengganggu. Mereka meminta-minta uang, menjual tisu ada juga yang mengamen. Mengganggu

kami pengguna jalan, kadang kasihan melihatnya. Tetapi tidak baik juga jika terus dibiarkan. Karena mereka akan pergi bila dikasih uang."

Berdasarkan pernyataan tersebut, Pak Kamaruddin keberadaan para penyandang penyakit social tersebut jelas bahkan sering memaksa untuk diberikan uang. Masyarakat dibuat sersah dengan keberadaan mereka. Seperti yang kemukakan oleh Bapak Kamaruddin. hal lain juga dikemukakan oleh masyarakat yang berhasil memberi pernyataan di hari yang sama oleh peneliti. Ibu Lela mengungkapkan:

"menurut saya, mereka masih banyak yang berkeliaran. Peraturan yang ada sepertinya belum berjalan efektif. Saya kira mereka sudah dibina, harusnya tidak turun lagi ke jalanan. Apalagi di jalan pettarani, kalau saya pulang dari kantor saya sering lihat gelandangan distu."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Bu Lela menilai bahwa kebijakan pembinaan ini dikatakan belum terlalu efektif. Masih banyak terlihat penyandang penyakit social tersebut di persimpangan jalan dan lampu merah. Terlihat juga di beberapa tempat umum lainnya. Setelah mendapatkan pernyataan dari masyarakat, peneliti mengkonfirmasi pada pihak Dinsos. Peneliti melakukan Tanya jawab dengan Kepala Rehsos pada hari Kamis tanggal 20 Juni, beliau mengatakan:

"hal itu tidak bisa dipungkiri karena memang keberadaan mereka masih ada. Kamipun tidak dapat memberi jaminan bahwa mereka yang telah mendapatkan pembinaan tidak akan kembali lagi ke jalanan. Jadi lihat kembali pada masing-masing individu, jika dari mereka memiliki keinginan untuk merubah nasib, pasti bisa."

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Dinsos Kota Makassar sendiri tidak dapat menjamin para penyandang penyakit social yang sudah mendapatkan pembinaan nantinya tidak akan turun lagi ke jalanan. Namun Dinsos selalu berusaha untuk mengurangi jumlah anjal dan gepeng setiap tahunnya. Kembali lagi kepada individu masing-masing, karena tidak sedikit mereka yang bisa berubah dan mereka memiliki harapan hidup yang lebih baik. Jadi kesimpulannya yakni masyarakat Kota Makassar masih ada yang belum aktif berperan untuk membantu Pemkot dalam merealisasikan kebijakan ini, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang memberikan uangnya kepada para penyandang penyakit social dengan berbagai alasan.

Sikap Para Pelaksana

Dinsos Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun

horizontal. Disini Dinsos Kota Makassar memiliki tugas untuk melaksanakan apa yang menjadi amanat dalam Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sesuai dengan peraturan, salah satu fungsi Dinsos Kota Makassar adalah "Pengendalian Permasalahan Sosial Berbasis Masyarakat". Maksudnya adalah manusia membutuhkan kepercayaan diri yang dilandasi oleh nilai-nilai kultur lokal yang diarahkan kepada aspek tatanan kehidupan dan penghidupan untuk menciptakan kemandirian lokal sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan kerja, ketentraman, kedamaian, dan keadilan sosial yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan sosial bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan sosial masyarakatnya, serta mendorong tingkat partisipasi sosial masyarakat dalam ikut melaksanakan proses pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat. Objek dari pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 ini yaitu anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Dinsos pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, beliau mengatakan:

"kami berkomitmen memberikan hasil yang terbaik dalam menekan keberadaan anjal, gepeng dan pengamen. Sampai saat ini memang belum maksimal dan belum sesuai yang diharapkan. Tapi dengan terbentuknya Tim Reaksi Cepat Saribattang terlihat keberadaan anjal, gepeng dan pengamen berkurang. Agar Tim TRC ini bisa berjalan secara maksimal, saya selalu menghimbau kepada mereka yang terlibat didalamnya untuk selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin dan berjangka"

Kemudian peneliti mewawancarai kepala bidang Rehsos pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019, yang mengatakan:

"kalau dibidang saya sendiri, pasti semua kasi paham dengan tupoksi masing-masing. Terutama seksi yang berhubungan langsung dengan pembinaan anjal, gepeng dan pengamen, kan seksi ini yang melaksanakan patroli, pendataan dsb. Apalagi patroli ini kan kegiatan yang intens dilakukan, setiap hari bahkan. Jadi tidak mungkin para pelaksana tugasnya masih belum paham dalam melaksanakan tupoksinya."

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada saat Tim TRC tidak melaksanakan patroli, Tim TRC standby di posko menunggu laporan yang masuk dari masyarakat setempat. Baik itu melalui laporan via telepon maupun pesan singkat. Ketika Tim TRC mendapat laporan yang bersifat pengaduan tentang keberadaan anjal, gepeng dan pengamen yang mengganggu kegiatan masyarakat,

maka dengan cepat Tim TRC turun kelapangan ke tempat titik laporan tersebut.

Hal tersebut didukung oleh salah satu masyarakat yang menjual Pisang Epe' di pantai Losari, peneliti mewawancarai Bapak Hasyim pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019, dan beliau mengatakan:

“Selamaku berjualan disini memang seringka liat itu ada mobil TRC keliling Makassar, karena saya berjualan disini, jadi paling keliling-keliling daerah sini ji. Biasa teriak-teriakki itu pake toa, dia bilang janganki kasih uangta sama anak jalanan. Paling sering pagi-pagi keliling. Tapi kalau hari libur kadang-kadang ji”

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, sikap para pelaksana pada dasarnya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang masing-

Tabel 6.

Matriks SWOT

		STRENGTHS (S)	WEAKNESSES (W)
Faktor Internal		<ol style="list-style-type: none"> Memiliki Visi dan Misi yang baik; Komitmen yang jelas dari pimpinan. 	<ol style="list-style-type: none"> Masih ada masyarakat yang memberikan uang kepada para anjal, gepeng dan pengamen; Sumber daya dana yang belum memadai.
	Faktor Eksternal		
	OPPORTUNITIES (O)	Strategi SO	Strategi WO
	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Daerah yang mendasari. Diterimanya aspirasi (kritik dan saran) dari masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan penegakan Perda yang sesuai dengan ketentuan. Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan lapangan. Program pencapaian tujuan pembentukan perda. 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat mengenai bahaya memberika uang kepada anjal, gepeng dan pengamen. Menganggarkan untuk meningkatkan sumber daya dana yang belum memadai.
	THREATS (T)	Strategi ST	Strategi WT
	<ol style="list-style-type: none"> Jumah keberadaan anjal, gepeng dan pengamen yang terus bermunculan. Adanya alibi para anjal, gepeng dan pengemis dalam mengais rejeki. Adanya dampak lain yang ditimbulkan oleh anjal, gepeng dan pengamen. Belum adanya panti rehabilitasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan partroli secara intens dengan waktu yang random. Menindak dengan tegas para anjal, gepeng dan pengamen yang beralibi berdangan di jalanan. Membuat tempat rehabilitasi sosial untuk bisa melaksanakan pembinaan secara maksimal. 	<ol style="list-style-type: none"> Para pelaksana kebijakan lebih tegas kembali dalam melakukan pembinaan terutama saat patroli dan razia.

Sumber: diolah oleh peneliti tahun 2019

Berdasarkan hasil identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal pada analisis SWOT, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis guna untuk menyelesaikan

masing, walaupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan maksimal, tetapi komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan guna meminimalisir masalah yang akan timbul.

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*)

Analisa SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilih berbagai hal yang mempengaruhi variabelnya yakni kekuatan (*strenght*), peluang (*opportunities*), kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threaths*) yang kemudian diterapkan dalam matriks SWOT. Berdasarkan analisis, penulis mencoba untuk menjelaskan mengenai kekuatan, peluang, kelemahan, dan ancaman dari implementasi kebijakan tersebut.

permasalahan yang dihadapi oleh Dinsos dalam implementasi penegakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan,

gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar yaitu:

- a. Pelaksanaan penegakan Perda yang sesuai dengan ketentuan;
- b. Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan lapangan;
- c. Program pencapaian tujuan pembentukan perda;
- d. Melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat mengenai bahaya memberikan uang kepada anjal, gepeng dan pengamen;
- e. Menganggarkan untuk meningkatkan sumber daya dana yang kurang memadai;
- f. Melaksanakan patroli secara intens dengan waktu yang random;
- g. Menindak dengan tegas para anjal, gepeng dan pengamen yang beralibi berdagang di jalanan;
- h. Membuat tempat rehabilitasi sosial untuk bisa melaksanakan pembinaan secara maksimal;
- i. Dan para pelaksana kebijakan lebih tegas kembali dalam melakukan pembinaan terutama saat patroli dan razia.

Diskusi Temuan Utama Penelitian. Peneliti sebelumnya telah menunjukkan bahwa kendala terbesar dalam melakukan pembinaan terhadap para penyandang penyakit social tersebut adalah kurangnya sarana dan prasarana serta minimnya sumber daya manusia yang tersedia sehingga keberadaan mereka terus meningkat disetiap tahunnya. Sangat dibutuhkan kerja keras pemerintah setempat agar keberadaan mereka benar-benar bisa berkurang karena kemiskinan merupakan factor turunnya mereka ke jalanan. Pada penelitian ini, kebijakan yang Kota Makassar buat, sudah mengandung makna dan tujuan yang sangat positif dalam mengurangi keberadaan para penyandang penyakit social. Maka untuk memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut, perlu meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkompeten dibidangnya, penambahan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pembinaan. Dan pihak Dinsos memberikan edukasi kepada masyarakat dengan dengan tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat agar masyarakat berperan serta dalam menghadapi masalah ini. Aktivitas program ini untuk menggugah masyarakat agar mereka peduli terhadap mereka di jalanan kegiatan ini dapat berupa penerbitan bulletin, poster, iklan layanan masyarakat di TV dan sebagainya.

Diskusi Temuan Menarik Lainnya. Setelah melakukan penelitian penulis masih menemukan masyarakat yang memberikan uang kepada para penyandang penyakit social tersebut. Hal tersebut membuat para penyandang masalah sosial tersebut kembali turun ke jalanan walaupun mereka sudah tertangkap pada saat patroli, kemudian Dinsos Kota Makassar juga belum memiliki panti rehabilitasi sosial.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan implementasi kebijakan pembinaan anjal, gepeng, dan pengamen di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa:

1. Ukuran dan Tujuan kebijakan
Masih adanya ukuran dan tujuan yang belum tercapai oleh Dinsos Kota Makassar dalam hal ini masih adanya keberadaan anjal, gepeng dan pengamen bahkan di waktu-waktu pada saat Dinsos tidak melakukan patroli keliling.
2. Sumber Daya
Dari sumber Daya sendiri, terdapat sumber daya dana dimana sumber daya dana tambahan guna menunjang serta meningkatkan kinerja para pegawai terutama pegawai yang setiap hari turun melaksanakan patroli dan berhubungan langsung dengan kegiatan di lapangan.
3. Karakteristik Instansi Pelaksana
Karakteristik dari Dinsos Kota Makassar dalam melaksanakan kebijakan ini, mereka menyesuaikan dengan objek yang ditemukan pada saat di lapangan. Bila para anjal, gepeng dan pengemis tidak bisa diamankan secara persuasive maka petugas di lapangan akan bertindak secara represif, terutama kepada para objek yang berusaha kabur bahkan melawan pada saat patroli dan razia berlangsung.
4. Komunikasi Antar Organisasi
Dinsos Kota Makassar merupakan pelaksana utama untuk menerapkan kebijakan pembinaan. Dinsos dibantu oleh beberapa elemen seperti panti rehabilitasi, YKP2n, dan satpol PP. Dinsos menganggap bahwa koordinasi dan komunikasi terhadap pihak YKP2N sudah cukup baik, YKP2N bersedia untuk membantu Dinsos untuk menindaklanjuti dan melakukan rehabilitasi para anjal dan gepeng positif sebagai pengguna narkoba.
5. Lingkungan Ekonomi, Sosial, Dan Politik
Dinsos Kota Makassar tidak menjamin para penyandang penyakit social yang telah mendapatkan pembinaan dan kembali lagi ke jalanan. Namun setidaknya, Dinsos telah mengupayakan berbagai cara untuk mengurangi jumlah keberadaan mereka. Namun kembali pada individu masing-masing. Tidak sedikit dari mereka yang telah terjaring razia kemudian sudah dibina namun tetap memilih untuk kembali ke jalanan. Walaupun banyak pula dari mereka ingin berubah dan mereka menginginkan arah hidup yang lebih layak. Kesimpulannya yakni, masih ada masyarakat yang belum

berperan secara aktif dalam membantu Pemkot Makassar terutama dalam menerapkan kebijakan ini, dikarenakan masih terdapat masyarakat yang memberi uangnya kepada para anjal dan gepeng.

6. Sikap Para Pelaksana

Dinsos Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Dinsos Kota Makassar mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah menyelenggarakan pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana sesuai dengan peraturan, sikap para pelaksana pada dasarnya sudah mengetahui tugas pokok dan fungsi bidang masing-masing, walaupun pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya belum terlaksana dengan maksimal, tetapi komunikasi dan koordinasi selalu dilakukan guna meminimalisir masalah yang akan timbul.

Berdasarkan hasil identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal pada analisis SWOT, dihasilkan 9 (sembilan) isu strategis guna untuk menyelesaikan permasalahan yang, yaitu:

- a. Pelaksanaan penegakan Perda yang sesuai dengan ketentuan;
- b. Program dan kegiatan yang disesuaikan dengan permasalahan lapangan;
- c. Program pencapaian tujuan pembentukan perda;
- d. Melakukan sosialisasi secara intens kepada masyarakat mengenai bahaya memberika uang kepada anjal, gepeng dan pengamen;
- e. Menganggarkan untuk meningkatkan sumber daya dana yang kurang memadai;
- f. Melaksanakan partroli secara intens dengan waktu yang random;
- g. Menindak dengan tegas para anjal, gepeng dan pengamen yang beralibi berdangan di jalanan;
- h. Membuat tempat rehabilitasi sosial untuk bisa melaksanakan pembinaan secara maksimal;
- i. Dan para pelaksana kebijakan lebih tegas kembali dalam melakukan pembinaan terutama saat patroli dan razia.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Fakultas politik pemerintahan, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Tim Reaksi Cepat Tanggap Kota Makassar, Rumah Perlindungan Sosial Anak dan seluruh informan serta berbagai pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data selama penelitian.

VI. REFERENSI

- Anasiru, Ronawaty. 2011. "Implementasi Model-Model Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Makassar." *Sosiokonsepsia*.
- Asrul Nurdin. 2011. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah No 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Cindy Ayu Prasasi, Lita Tyesta ALW, Ratna Herawati. 2016. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis." *Diponegoro Law Journal*.
- Engkus, Engkus. 2019. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Jalanan Di Kota Bandung." *MEDIA BINA ILMIAH*. doi: 10.33758/mbi.v14i3.308.
- Fatima, Fajar Nur'aini Dwi. 2016. *Teknik Analisis SWOT*. Jogjakarta: Quadrant.
- Van Meter, Donald S., and Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*. doi: 10.1177/009539977500600404.
- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Dan Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nusanto, Baktiawan. 2017. "Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District)." *Jurnal Politico* 17(2, September):339–60.

Putro, Rizky Dwitanto. 2014. "Pembinaan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Di Balai Rehabilitasi Sosial." *Pembinaan Pengemis, Gelandangan Dan Orang Terlantar (PGOT) Di Balai Rehabilitasi Sosial "Samekto Karti"* Pematang.

Susilowati, Dwi. 2017. "Kebijakan Penanggulangan Anak Jalanan Di Kota Malang." in *Seminar Nasional dan Gelar Produk 17-18 Oktober*.

Suyanto, Bagong. 2011. *Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok*. Malang: In-Trans Publishing.

Tribuwono, Jonathan. 2017. "Implementasi Kebijakan Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis Dan Pengamen Di Kota Makassar (Studi Kasus Pada Dinas Sosial)." [Http://Digilib.Unhas.Ac.Id/Uploaded_files/Temporary/DigitalCollection/MmE0MDJlZjQ0NjUxYzkwYzdiNjAwZWY2MTM2OTVhOTA5MTAwNmVmYg==.Pdf](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/Temporary/DigitalCollection/MmE0MDJlZjQ0NjUxYzkwYzdiNjAwZWY2MTM2OTVhOTA5MTAwNmVmYg==.Pdf).